

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengembangan Kurikulum Berbasis Religi

1. Pengertian Pengembangan Kurikulum Berbasis Religi

Sebelum membahas tentang pengembangan kurikulum berbasis Religi, terlebih dahulu akan di bahas tentang pengembangan. Kata Pengembangan memiliki banyak arti, diantaranya “perubahan, pembaharuan, perluasan, dan sebagainya”.¹ Dalam arti yang sering digunakan atau pada umumnya “pengembangan berarti menunjuk pada suatu kegiatan yang menghasilkan cara baru setelah diadakan penilaian serta penyempurnaan seperlunya.”² Jadi yang di maksud dengan pengembangan adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan.

Secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *cerir* yang artinya pelari atau *curere* yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus di tempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish.³ Nana Saodih, mengemukakan

¹ Winarto Surakhmad, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 1997), 15.

² Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 3.

³ Moh. Haitami, *Studi Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media: 2012), 199.

pandangan tradisional tentang kurikulum adalah; “Program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan, yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis di berikan kepada peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi serta kompetensi sosial peserta didik.”⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁵

Kedua istilah inilah yang kemudian digabungkan dan terkenal dengan pengembangan kurikulum. Sukmadinata dalam Wina Sanjaya mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum memiliki makna yang sangat luas yaitu:

“Menyusun seluruh perangkat kurikulum mulai dari dasar-dasar kurikulum, struktur dan sebaran mata pelajaran, GBPP, sampai dengan pedoman-pedoman pelaksanaan. Pada sisi lain berkenaan juga dengan penjabaran GBPP yang telah disusun menjadi rencana dan persiapan-persiapan mengajar yang lebih khusus yang dikerjakan oleh guru-guru di sekolah, seperti menyusun rencana tahunan, caturwulan, satuan pelajaran, dan lain-lain.”⁶

⁴ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 3.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 19.

⁶ Moh. Bajher Kamahi, *Pengembangan Kurikulum Berbasis Interelasi Pendidikan Agama Islam dan Mata Pelajaran Kejuruan di Smk Muhammadiyah 2 Kota Malang* (Thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 22.

Menurut Hamalik, yang dimaksud pengembangan kurikulum adalah. “perencanaan kesempatan kesempatan belajar untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa.”⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia religi adalah kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia.⁸ Sedangkan pengertian religius menurut Jamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso Religius adalah “aktivitas beragama yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural”.⁹

Sedangkan religius menurut Kurikulum 2013 merupakan suatu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, hidup rukun dengan pemeluk agama lain.¹⁰

Dari beberapa definisi diatas, maka yang terkait dengan tujuan penelitian ini adalah pengembangan kurikulum religi dengan melakukan perencanaan guna memberikan kesempatan belajar kepada siswa, agar sesuai dengan arah perubahan karakter yang diinginkan. Perubahan karakter tersebut adalah berupa proses menghubungkan kompetensi

⁷ Ibid., 23.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar*, 830.

⁹ Jamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), 76.

¹⁰ Sjrkwari, *Pembentukan Karakter Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 18.

yang dimiliki keterkaitan kegiatan di ma'had dan di madrasah, sehingga mampu memberikan kesempatan belajar kepada siswa agar menguasai nilai-nilai ajaran agama yang relevan sesuai dengan kompetensi yang dipelajarinya.

Kurikulum berbasis religi dalam penelitian ini diartikan sebagai proses pengembangan kurikulum untuk penguatan nilai-nilai religius atau budi pekerti plus (melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan) siswa dengan mengangkat materi dan masalah-masalah yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai, ke dalam topik-topik kurikulum, dan dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari, dan menghubungkan dengan konsep konsep yang ada dalam pokok bahasan.

Pengembangan kurikulum berbasis religi dalam penelitian ini mengacu kepada pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan nilai yang bersumber dari agama, yaitu (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja Keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab.¹¹ karakter

¹¹ Kementerian Pendidikan Nasional, *tentang Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, 2011.

nilai-nilai karakter ini yang relevan dengan standart isi dan standart kompetensi lulusan.

2. Tujuan Pengembangan Kurikulum Berbasis Religi

Pengembangan kurikulum berbasis religi ini dilakukan sejalan dengan tujuan diterapkannya Kurikulum 2013 yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, melainkan pada afektif dan juga psikomotoriknya. Kurikulum yang dikembangkan haruslah juga berpedoman pada standart isi (SI), standart kompetensi kelulusan (SKL), dan standart kompetensi penilaian (SKP) yang telah ada dan dikeluarkan oleh Badan Standart Nasional Pendidikan (BSNP). Semua berlandaskan pada prinsip-prinsip yang berpusat pada potensi, pertumbuhan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Disamping itu juga beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbagai aspek secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Perumusan tujuan adalah menjadi langkah pertama dalam pengembangan kurikulum, karena aspek tujuan dapat berfungsi untuk menentukan arah seluruh upaya serta kegiatan pengembangan yang dilakukan. Menurut Hamalik: “istilah yang digunakan untuk menyatakan tujuan pengembangan kurikulum adalah *goals* dan *objectives*. Tujuan *goals* dinyatakan dalam rumusan yang bersifat abstrak dan umum, serta pencapaiannya relatif dalam jangka panjang. Sedangkan tujuan *objectives* lebih bersifat khusus, operasional, dan

pencapaiannya dalam jangka pendek.¹² Pengembangan kurikulum berbasis religi ini memiliki tujuan jangka panjang berupa, dapat tumbuhnya nilai-nilai islami yang nantinya diamalkan, manakala para siswa telah terjun dalam dunia pekerjaan dan dunia usaha ataupun sebagai warga masyarakat secara luas. Sedangkan untuk tujuan jangka pendeknya adalah terciptanya kerjasama antara para guru madrasah dan ma'had dalam membina pengetahuan dan karakter religious siswa. Disamping itu menjadi tanggung jawab bersama dalam penciptaan lingkungan dan karakter yang religious sesuai dengan tujuan madrasah serta visi dan misi suatu lembaga pendidikan.

3. Landasan Pengembangan Kurikulum

Landasan merupakan suatu yang harus ada. Karena ia menjadi dasar pijakan, acuan dalam menentukan arah tindakan yang akan diambil. Oleh karena begitu penting adanya landasan itu maka dalam mengembangkan kurikulum juga di dasarkan pada landaan-landasan tertentu. Adapun beberapa landasan utama dalam mengembangkan suatu kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis.¹³

a. Landasan Filosofis

pendidikan interaksi antar manusia, terutama antara pendidik dan terdidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalam interaksi

¹² Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, cet 3, 2008), 187.

¹³ Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 38.

tersebut terlibat isi yang diinteraksiakn serta proses bagaimana interaksi tersebut berlangsung. Apakah yang menjadi tujuan pendidikan, siapa pendidik dan terdidik, apa isi pendidikan dan bagaimana proses interaksi pendidikan tersebut, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang mendasar, yang esensial yaitu jawaban-jawaban filosofis. Secara akademik, filsafat berarti upaya untuk menggambarkan dan menyatakan suatu pandangan yang sistematis dan komprehensif berarti menangkap sinopsis peristiwa-peristiwa yang saling simpang siur dalam pengalaman manusia. Filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia, berusaha melihat segala yang ada ini sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan mencoba mengetahui kedudukan manusia di dalamnya.

Filsafat membahas segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia termasuk masalah-masalah pendidikan ini yang disebut filsafat pendidikan. Walaupun dilihat sepintas, filsafat pendidikan ini hanya merupakan aplikasi dan pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Menurut Donald Butler, filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap praktik pendidikan, sedangkan praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan-pertimbangan filosofis.¹⁴

¹⁴ Ibid., 39.

b. Landasan Psikologis

Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar-individu manusia, yaitu antara peserta didik dengan pendidik dan juga antara peserta didik dengan orang-orang yang lainnya. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya, karena kondisi psikologisnya. Peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Tugas utama yang sesungguhnya dari para pendidik adalah membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Sejak kelahiran sampai menjelang kematian, anak selalu berada dalam proses perkembangan, perkembangan seluruh aspek kehidupan.

Perkembangan atau kemajuan-kemajuan yang dialami anak sebagian besar terjadi karena usaha belajar, baik berlangsung melalui proses peniruan, pengingatan, pembiasaan, pemahaman, penerapan, maupun pemecahan masalah. Pendidik atau guru melakukan berbagai upaya, dan menciptakan berbagai kegiatan dengan dukungan berbagai alat bantu pengajaran agar anak-anak belajar. Cara belajar mengajar mana yang dapat memberikan hasil secara optimal serta bagaimana proses pelaksanaannya membutuhkan studi yang sistematis dan mendalam.¹⁵

4. Komponen-Komponen Pengembangan Kurikulum

¹⁵ Ibid., 46.

Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan memiliki komponen-komponen pokok yang saling berkaitan satu sama lainnya. Adapun komponen-komponen tersebut meliputi:¹⁶

a. Komponen Tujuan

Dalam rangka dasar kurikulum, tujuan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, karena akan mengarahkan dan memengaruhi komponen-komponen kurikulum lainnya. Tujuan pendidikan itu pada akhirnya harus diterjemahkan kedalam ciri-ciri atau sifat-sifat sebagai wujud perilaku dan pribadi manusia yang di cita-citakan. Pada tingkat tujuan dan sasaran akhir yang universal, kita dapat membayangkan bagaimana pribadi idola peserta didik sebagai warga dunia yang harus memiliki kemampuan dan kecakapan dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung sehingga mampu berkomunikasi satu sama lain.

Bagi Indonesia, yang menetapkan Pancasila sebagai pandangan hidupnya, sudah selangkahnya mengarahkan sistem pendidikannya pada pembentukan, sudah selangkahnya mengarahkan sistem pendidikannya pada pembentukan warga negara yang cakap untuk memahami, menghayati dan mengamalkan falsafah negara, yaitu Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan yang

¹⁶ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 81.

adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawarah perwakilan, persatua Indonesia.

Tujuan pendidikan formal dirumuskan langsung oleh pemerintah sebagai pedoman bagi pengembangan tujuan-tujuan pendidikan yang lebih khusus. Tujuan institusional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap lembaga pendidikan, baik pendidikan formal (TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA) maupun pendidikan nonformal (lembaga kursus, pesantren).¹⁷

b. Komponen Isi

Isi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Hilda Taba memberikan kriteria untuk memilih isi/materi kurikulum sebagai berikut: (a) materi itu harus sah dan signifikan, artinya harus menggambarkan pengetahuan muthakir, (b) materi itu harus relevan dengan kenyataan sosial, (c) materi harus mengandung keseimbangan antara keluasan dan kedalaman, (d) materi harus mencakup berbagai ragam tujuan, (e) materi harus sesuai dengan kemampuan dan pengalaman peserta didik, (f) materi harus sesuai dengan kebutuhan minat peserta didik.

Pada kurikulum pendidikan formal, pada umumnya organisasi isi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran yang

¹⁷ Ibid., 83.

terstruktur dalam kurikulum sesuai dengan tujuan institusional. Ada beberapa jenis struktur kurikulum, yaitu: pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kejuruan.¹⁸

c. Komponen Proses

Proses pelaksanaan kurikulum harus menunjukkan adanya kegiatan pembelajaran, yaitu antara guru dan peserta didik. Guru dituntut untuk menggunakan berbagai strategi pembelajaran, metode mengajar, media pembelajaran, dan sumber-sumber belajar. Pemilihan strategi harus disesuaikan dengan tujuan kurikulum (SK/KD), Karakteristik materi pelajaran, dan tingkat perkembangan peserta didik.

Selain strategi ada juga metode, metode sangat penting bagi guru untuk menyampaikan isi kurikulum atau materi pelajaran sesuai dengan tujuan kurikulum. Untuk memilih metode mana yang akan digunakan, guru dapat melihat dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan yang berpusat pada matapelajaran, pendekatan yang berpusat pada peserta didik dan masyarakat. Di dalam kegiatan pembelajaran, guru harus dapat menggunakan multimedia, baik media visual, media audio, maupun media audio-visual.¹⁹

¹⁸ Ibid., 92.

¹⁹ Ibid., 92.

d. Komponen Evaluasi

Untuk mengetahui efektifitas kurikulum dan dalam upaya memperbaiki serta menyempurnakan kurikulum, maka diperlukan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan usaha yang sulit dan kompleks, karena banyak aspek yang harus dievaluasi, banyak orang yang terlibat, dan luasnya kurikulum yang harus diperhatikan. Evaluasi kurikulum memerlukan ahli-ahli yang mengembangkan menjadi suatu disiplin ilmu.²⁰

5. Model - Model Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum tidak dapat lepas dari berbagai aspek yang memengaruhinya, seperti cara berpikir, sistem (nilai moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial), proses pengembangan, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat maupun arah program pendidikan. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain (*designing*), menerapkan (*implementation*), dan mengevaluasi (*evaluation*) suatu kurikulum. Agar dapat mengembangkan kurikulum secara baik, pengembangan kurikulum semestinya memahami berbagai jenis model pengembangan kurikulum yaitu langkah atau prosedur sistematis dalam proses

²⁰ Ibid., 93.

penyusunan suatu kurikulum.²¹ Adapun Model model pengembangan kurikulum yaitu:

a. Model Ralph Tyler

Model pengembangan kurikulum yang dikemukakan Tyler (1949) ada empat tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum, yang meliputi:²²

1. Menentukan Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan harus menggambarkan perilaku akhir setelah peserta didik mengikuti program pendidikan, sehingga tujuan tersebut harus dirumuskan secara jelas sampai pada rumusan tujuan khusus guna mempermudah pencapaian tujuan tersebut. Ada tiga aspek yang harus dipertimbangkan sebagai sumber dalam penentuan tujuan pendidikan, yaitu: 1) hakikat peserta didik 2) kehidupan masyarakat masa kini, 3) pandangan para ahli bidang studi.

2. Menentukan Proses Pembelajaran

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penentuan proses pembelajaran adalah persepsi dan latar belakang kemampuan peserta didik, artinya, pengalaman yang sudah dimiliki siswa harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan proses pembelajaran selanjutnya.

²¹Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 78.

²²Ibid, 79.

3. Menentukan Organisasi Pengalaman Belajar

Bahan yang harus dipelajari peserta didik dan pengalaman belajar apa yang harus dilakukan, diorganisasikan, sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan. Kejelasan tujuan, materi belajar dan proses pembelajaran serta urutan-urutan, akan mempermudah untuk memperoleh gambaran tentang evaluasi pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan.

4. Menentukan Evaluasi Pembelajaran

Jenis penilaian yang akan digunakan, harus disesuaikan dengan jenis dan sifat dari tujuan pendidikan atau pembelajaran, materi pembelajaran, dan proses belajar yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Model Administratif

Pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Tim ini sekaligus sebagai tim pengarah dalam pengembangan kurikulum. Langkah kedua membentuk suatu tim pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum yang meliputi: ahli pendidikan, kurikulum, disiplin ilmu, tokoh masyarakat, tim pelaksana pendidikan, dan pihak dunia kerja.

Tim ini bertugas untuk mengembangkan konsep-konsep umum, landasan, rujukan, maupun strategi pengembangan kurikulum

yang selanjutnya menyusun kurikulum secara operasional berkaitan dengan pengembangan atau perumusan tujuan pendidikan maupun pembelajaran, pemilihan dan penyusunan rambu-rambu dan substansi materi pelajaran, menyusun alternatif proses pembelajaran, dan menentukan penilaian pembelajaran.

c. Model Grass Roots

Dalam prosesnya pengembangan kurikulum ini diawali atau dimulai dari gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Model Grass Roots lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana di lapangan sehingga perbaikan dan peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik menuju pada bagian-bagian yang lebih besar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum model Grass Roots, diantaranya: 1) guru harus memiliki kemampuan yang profesional, 2) guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum; 3) guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi; 4) seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan akan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip maupun rencana-rencana.

d. Model Miller- Seller

Pengembangan kurikulum ini ada perbedaan dengan model-model sebelumnya. Model pengembangan kurikulum Miller-Seller

merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi (*Gagne*) dan model transaksi (*Taba's & Robinson*), dengan tahapan pengembangan sebagai berikut:

1) Klarifikasi Orientasi Kurikulum

Orientasi ini merefleksi pandangan filosofis, psikologis, dan sosiologis terhadap kurikulum yang seharusnya dikembangkan. Menurut Miller dan Seller, ada tiga jenis orientasi kurikulum, yaitu transmisi, transaksi, dan transformasi.

2) Pengembangan Tujuan

Setelah klarifikasi orientasi kurikulum, langkah berikutnya mengembangkan tujuan umum (*aims*) dan mengembangkan tujuan khusus berdasarkan orientasi kurikulum yang bersangkutan. Tujuan umum dalam konteks ini adalah merefleksi pandangan orang (*image person*) dan pandangan (*image*) kemasyarakatan. Tujuan pengembangan merupakan tujuan yang masih umum, maka perlu dikembangkan tujuan-tujuan yang lebih khusus hingga pada tujuan instruksional.

3) Identifikasi Model Mengajar

Strategi mengajar harus sesuai dengan tujuan dan orientasi kurikulum. Adapun kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan model mengajar yang akan digunakan, yaitu:

a) Disesuaikan dengan tujuan umum maupun tujuan khusus.

- b) Strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan siswa.
 - c) Guru yang menerapkan kurikulum ini harus sudah memahami secara utuh, sudah dilatih, dan mendukung.
 - d) Tersedia sumber-sumber yang esensial dalam pengembangan model.
- 4) Implementasi

Implementasi sebaiknya dilaksanakan dengan memerhatikan komponen-komponen program studi, identifikasi sumber, peranan, pengembangan profesional, penetapan waktu, komunikasi, dan sistem, dan sistem monitoring. Langkah ini merupakan langkah akhir dalam pengembangan kurikulum.²³

Berdasarkan beberapa model pengembangan kurikulum, dengan memperhatikan suatu proses sistem perencanaan program pembelajaran, standart keberhasilan, berdasarkan pada perkembangan teori dan praktik kurikulum. di harapkan pendidikan di indonesia mampu menjadi lebih baik.

C. Pembentukan Karakter

1. Pengertian Karakter

Karakter diambil dari bahasa Yunani yang berarti “*to mark*” (menandai). Dan memfokuskan bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-hari. Oleh sebab itu

²³Ibid, 85.

seseorang berperilaku tidak jujur, curang, kejam, atau rakus dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter jelek, sedangkan yang berperilaku baik, jujur, dan suka menolong, dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter baik/mulia.²⁴

Sejalan dengan pendapat tersebut, karakter menurut Dirjen Pendidikan Agama Islam kementerian Agama Republik Indonesia yang dikutip oleh E. Mulyasa “karakter (*charracter*) dapat diartikan sebagai totalitas ciri-ciri pribadi yang melekat dan dapat diidentifikasi pada perilaku individu yang bersifat unik, dalam arti secara khusus ciri-ciri ini membedakan antara satu individu dengan individu yang lain.²⁵

2. Nilai- Nilai Karakter

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai merupakan sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Jadi, nilai dalam pendidikan karakter yaitu suatu hal yang penting yang berkaitan dengan karakter.

Pendidikan karakter di Indonesia didasarkan pada sembilan pilar karakter dasar. Karakter dasar menjadi tujuan pendidikan karakter. Sembilan karakter tersebut adalah, 1) cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya; 2) tanggung jawab, disiplin, dan mandiri; 3) jujur; 4) hormat dan santun; 5) kasih sayang, peduli, dan kerja sama; 6) percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah; 7) keadilan dan

²⁴E Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 3.

²⁵Ibid, 4.

kepemimpinan; 8) baik dan rendah hati, dan 9) toleransi, cinta damai, dan persatuan.

Sedangkan menurut Thomas Lickona sebagaimana yang dikutip oleh Fatchul Mu'in, menyebutkan tujuh unsur-unsur karakter esensial yang utama yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang meliputi: ketulusan hati atau kejujuran, belas kasih, kegagahberanian, kasih sayang, kontrol diri, kerja sama, dan kerja keras. Tujuh karakter inti inilah, menurut Thomas Lickona yang paling penting dan mendasar untuk dikembangkan pada peserta didik, disamping banyaknya unsur-unsur karakter lain.²⁶

Adapun dalam naskah akademik Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah merumuskan 18 nilai karakter yang akan ditanamkan kepada anak-anak dan generasi muda bangsa Indonesia.²⁷

Nilai-nilai karakter tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Religius; merupakan suatu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

²⁶ Fatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoritik dan Praktik* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 273.

²⁷ Dalmeri, "Pendidikan Untuk Pengembangan Karakter (Telaah terhadap Gagasan Thomas Lickona dalam Educating for Character)", *Jurnal Al-Ulum Vol. 14 Nomor 1, Juni 2014*, 273.

- b. Jujur; merupakan suatu perilaku yang didasarkan kepada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.
- c. Toleransi; merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
- d. Disiplin; merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.
- e. Kerja keras: merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f. Kreatif; merupakan berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
- g. Mandiri; yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dijalankan.
- h. Demokratis; merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama antara hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- i. Rasa ingin tahu; merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

- j. Semangat kebangsaan; yaitu cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
- k. Cinta tanah air; yaitu cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
- m. Menghargai prestasi; yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
- o. Bersahabat/komunikatif; merupakan suatu tindakan memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
- p. Cinta damai; yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
- q. Gemar membaca; merupakan suatu kebiasaan dalam menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya,
- r. Peduli lingkungan; yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi.
- s. Peduli sosial; merupakan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

- t. Tanggung jawab; yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, sosial, dan budaya, negara dan Tuhan Yang Maha Esa.²⁸

3. Faktor-Faktor Pembentukan Karakter

Kepribadian itu berkembang dan mengalami perubahan-perubahan. Tetapi di dalam perkembangan itu semakin terbentuk pola-polanya yang tetap dan khas, sehingga merupakan ciri-ciri yang unik bagi setiap individu.

Faktor yang mempengaruhi kepribadian atau karakter dapat di bagi sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetik atau bawaan. Faktor genetik maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir atau merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu dari kedua orang tuanya atau bisa jadi gabungan atau kombinasi dari sifat kedua orang tuanya.²⁹

b. Faktor Eksternal

²⁸ Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter: Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 74-76.

²⁹ Sjrkwari, *Pembentukan Karakter Anak*, 19.

Adalah faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang mulai dari lingkungan tekecilnya, yakni keluarga, teman, tetangga, sampai masyarakat.

C. Program Keagamaan

1. Pengertian Program Keagamaan

Pengertian Program keagamaan adalah program tambahan pelajaran keagamaan dalam bentuk pendalaman minat keagamaan yang diberikan kepada peserta didik yang mengambil peminatan keagamaan. tujuan konkrit program keagamaan ini bertujuan untuk 1) menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang keagamaan (*Tafaqqub fiddin*), 2) menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang kebahasaan asing (minimal Bahasa Arab dan Bahasa Inggris), 3) menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang wawasan dan Khazanah keislaman.³⁰

2. Kebijakan Pemerintah Tentang Program Keagamaan

Kebijakan pemerintah terkait kelas keagamaan tertera pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomer 55 pasal 5 ayat 8 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, yang menjelaskan bahwa satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama

³⁰ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1293 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah, 1.

sesuai kebutuhan.³¹ Muatan yang dimaksud meliputi isi pendidikan/kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 tahun pendidikan/akademik berikutnya, sistem evaluasi dan manajemen dan proses pendidikan.

3. Kedudukan Program Keagamaan

Program Keagamaan merupakan program tambahan pelajaran keagamaan dalam bentuk pendalaman minat keagamaan yang diberikan kepada peserta didik yang mengambil peminatan keagamaan. Oleh karena itu, penyelenggara program keagamaan ini menggunakan struktur kurikulum yang berlaku tambahan pendalaman minat keagamaan.³²

4. Peserta Didik Program Keagamaan

- a) Peserta didik program keagamaan adalah peserta didik yang mengambil Peminatan Keagamaan.
- b) Peserta didik kelas program keagamaan wajib mengikuti pendalaman minat keagamaan.
- c) Seluruh peserta didik program keagamaan wajib tinggal di asrama madrasah.³³

³¹ peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 55 pasal 5 ayat 8 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan

³² Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1293 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah, 3.

³³ Ibid.

5. Struktur Kurikulum

Program Keagamaan melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah yang dimodifikasi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan target madrasah. Modifikasi kurikulum tersebut berupa penguatan konsep dasar penguasaan ilmu keagamaan dan kebahasaan. Secara umum struktur kurikulum program keagamaan mengacu pada Kurikulum 2013 (kurikulum nasional). Kurikulum program keagamaan merupakan kurikulum terintegrasi, sehingga kurikulumnya meliputi pembelajaran siang dan malam hari.³⁴

Tabel 2.1

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU		
	PER MINGGU		
	X	XI	XII
Kelompok A (Umum)	2	2	2
1 Pendidikan Agama Islam	2	2	2
a. Al-Quran Hadits	2	2	2
b. Akidah Akhlak	2	2	2
c. Fiqh	2	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3 Bahasa Indonesia	4	4	4
4 Bahasa Arab	2	2	2
5 Matematika	4	4	4
6 sejarah Indonesia	2	2	2
7 bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (umum)	2	2	2
1 Seni Budaya *	2	2	2
2 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3
3 Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
4 Muatan Lokal **	2	2	2
Jumlah Jam Kelompok A dan B Perminggu	34	34	34
Kelompok C (Peminatan)	2	2	2
1 Tafsir - Ilmu Tafsir	2	3	3

³⁴ Ibid., 4.

2	Hadits - Ilmu Hadits	2	3	3
3	Fiqh - Usul Fiqh	2	3	3
4	Ilmu Kalam	2	2	2
5	Akhlak	2	2	2
6	Bahasa Arab	2	3	3
Pendalaman Minat Keagamaan dan Lintas Minat				
1	Pendalaman Minat Keagamaan	8	6	6
Jumlah Alokasi Waktu per-Minggu		56	56	56

Keterangan:

- *) Mata Pelajaran Seni Budaya dapat memuat Bahasa Daerah
- ***) Muatan Lokal bersifat fleksibel sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing Madrasah untuk mendukung program keagamaan.

6. Materi Tambahan Program Keagamaan adalah:

- 1) Materi Dasar, yang terdiri dari: fikih, qur'an-hadis, akhlak, tauhid, sejarah Islam, dan bahasa (Arab dan Inggris)
- 2) Materi Pendalaman Minat terdiri dari: usul fikih, ulum al-Qur'an, ulum al-hadis, ilmu bahasa (nahwu, saraf, balaghah), mantik/falsafah/kalam.³⁵

7. Pengelolaan dan Waktu Pembelajaran

a) Pengelolaan Pembelajaran

Pengelolaan pembelajaran program keagamaan dituangkan secara terpadu ke dalam pembelajaran pada umumnya dalam bentuk:

- 1) Program Pembelajaran (Program Tahunan dan Program Semester);
- 2) Persiapan Pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Praktek Peserta Didik (*Job Sheet*).

³⁵ Ibid., 5.

3) Kegiatan pembelajaran meliputi tatap muka, praktik, dan mandiri.

b) Waktu Pembelajaran

1) Waktu belajar yang digunakan dalam program keagamaan per jam pelajaran adalah 45 menit

2) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kelas

3) Pengaturan jadwal pelajaran keagamaan diserahkan kepada madrasah penyelenggara program keagamaan.

8. Sistem Penilaian dan Sistem Evaluasi

a) Penilaian

Sistem penilaian yang digunakan dalam program keagamaan adalah penilaian berdasarkan Kurikulum 2013 (mengikuti ketentuan pemerintah).

b) Sistem Evaluasi

1) Dilaksanakan setiap Minggu, Tengah Semester, dan Akhir Semester

2) Jenis evaluasi dalam bentuk teori dan praktik

3) Setiap semester dilakukan laporan evaluasi pencapaian kompetensi

9. Standar Kompetensi Lulusan

a) Penguasaan ilmu keagamaan didukung oleh kemampuan bahasa yang memadai. Keilmuan keagamaan berfungsi sebagai pondasi dan dasar-dasar pengembangan keilmuan lebih lanjut. Lulusan Program Keagamaan sudah mampu memahami dan mendalami materi kitab-

kitab dasar dalam bidang keagamaan, seperti akhlak, tauhid, fikih, usul fikih, ulumul qur'an, tafsir, hadis, mustalah hadis, mantik, sejarah, dan bahasa (yang akan dijabarkan lebih lanjut di bagian materi kurikulum dan bahan ajar).

- b) Penguasaan bahasa: Indonesia, Arab, Inggris, dan bahasa asing lain baik tulis maupun lisan.
- c) Penguasaan teknologi informasi, terutama untuk pembelajaran. Kemampuan yang dikuasai tidak sekedar sebagai pengguna pasif, tetapi lebih sebagai pengguna aktif yang mampu memanfaatkan semua potensi dari setiap produk IT serta trik-trik untuk memaksimalkan penggunaannya untuk menunjang pembelajaran dan pengembangan keilmuan.